# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bab II Pasal 4, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Nasional yaitu :

> Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan dan usaha manusia dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing anak-anak didik menuju kedewasaan. Proses pendidikan yang diselenggarakan secara formal di sekolah tidak lepas dari kegiatan belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan membutuhkan tenaga pendidik untuk mengadakan proses belajar mengajar dan akhirnya akan tercapai hasil belajar atau prestasi belajar. Aunurrahman (2009:5) mengungkapkan bahwa "Pendidikan harus memiliki keseimbangan dalam perannya membangun peserta didik sebagai warga Negara dunia, warga bangsa dan warga masyarakat". Dengan demikian, secara filosofi arah pendidikan harus menyeimbangkan antara perkembangan global di satu sisi dan akar budaya dalam konteks lokal di sisi lain".

Isjoni (2009:7) menyatakan bahwasanya pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tujuan pendidikan menurut Masnur (2007:1) tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa:

> Pendidikan nasional yang baru ini sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena "harus mampu menjamin pemerataan kesempatan

> pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Peran guru secara umum adalah sebagai tugas pendidikan, meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Amiruddin (2013), memberikan definisi mengenai peran guru sebagai berikut yakni :

> Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua dan mampu menarik simpati peserta didik sehingga pembelajaran seperti apapun yang diberikan hendaknya menjadi motivasi bagi peserta didik dalam mengajar.

Peran guru adalah keseluruhan tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya, (Hartanti, 2017).

Peran guru dalam pendidikan menjadi faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Menurut Prof. Pupuh Fathurrohman peran dan tugas guru yaitu mengarahkan kegiatan yang berifat pembiasaan terhadap siswa untuk dapat menerapkan nilai dan norma, membimbing sikap disiplin siswa, memantau dan mengawasi perilaku siswa dalam pergaulan, serta memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan siswa yang dapat menciptakan rasa aman, tertib, dan menyenangkan di lingkungan sekolah. Guru sebagai sosok panutan yang perlu ditiru, mempunyai peran penting dalam aplikasi pendidikan karakter disekolah maupun diluar sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru menjadi sosok figur dalam rangka pengembangan karakter siswa yaitu guru harus mempunyai kepribadian

yang baik dan terintegrasi memiliki mental yang sehat. Pendidikan berupaya untuk membentuk siswa yang unggul dalam hal pengetahuan *(knowledge)*, sikap *(attitude)*, maupun keterampilan *(skill)*.

Negara yang demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai demokrasi. Perilaku dan budaya demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun budaya demokrasi tidak cukup dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, akan tetapi juga perlu mengenalkan atau mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi seperti, penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi. Hal senada dikemukakan oleh Paul Suparno (2004: 37) yang menyatakan bahwa nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif. Demokrasi menjunjung tinggi kesamaan hak setiap orang, yang artinya hak dirinya dan orang lain sama.

Senada dengan pendapat Zamroni (2001: 32) yang menyebutkan nilai demokrasi yaitu, a) toleransi, b) kebebasan mengemukakan pendapat, c) menghormati perbedaan pendapat, d) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, e) terbuka dalam komunikasi, f) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, g) percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, h) saling menghargai, i) mampu mengekang diri, j) kebersamaan, dan k) keseimbangan. Nilai demokrasi tidak secara langsung ditanamkan pada diri seseorang, melainkan tahap demi tahap. Nilai demokrasi yang menjadi fokus penelitian ini meliputi nilai berpartisipasi, toleransi dan saling menghargai.

Menurut Depdiknas (2006), Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentikan warga Negara yang

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Azyumardi Azra (2005:9), menyatakan bahwa :

> Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warga Negara serta proses demokrasi.

Menurut Merphin Panjaitan (2006:20), mengungkapkan bahwa :

> Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga Negara yang demokratis dan partisipatif melalui satuan pendidikan yang dialogial.

Kemampuan siswa berdemokrasi merupakan partisipasi peserta didik menghargai pendapat teman sebangku ketika rapat di kelas, biasanya hal ini dalam membahas organisasi intra dan ekstra sekolah. Sekolah merupakan tonggak dasar penanaman budaya demokrasi bagi generasi penerus bangsa, karena di sinilah mereka bertemu dengan berbagai macam pikiran-pikiran, watak, karakter, budaya, dan agama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam menumbuhkan budaya demokrasi di kalangan pelajar.

Oleh karena itu, sekolah harus menampilkan budaya demokratis dalam pengelolaan pendidikannya. Pengembangan nilai-nilai demokratis di sekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistensi yang kokoh ditengah-tengah konflik peradaban.

Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 4 Tuhemberua, nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya dilakukan oleh siswa di sekolah. Dapat diketahui bahwasanya kemampuan siswa berdemokrasi disekolah terdapatnya siswa yang tidak menghargai pendapat teman di kelas,

menentang keputusan bersama, mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama, tidak mengizinkan teman yang lain untuk memberikan pendapat, tidak menerima kritik dan saran, dan membuat keputusan sepihak. Biasanya juga hal ini terjadi dalam membahas organisasi intra sekolah yang implementasinya harus sesuai dengan azas demokrasi. Guru di sekolah merupakan tonggak dasar penanaman nilai demokrasi bagi generasi penerus bangsa, karena di sinilah ditempa siswa dengan berbagai macam pikiran-pikiran, watak, karakter, budaya, dan agama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam menumbuhkan budaya demokrasi di kalangan pelajar. Penanaman nilai demokrasi belum efektif terlaksana, hal ini peran guru belum maksimal, apalagi kesadaran akan nilai demokrasi dari siswa belum tertanam, hal ini dilihat dari karakter siswa yang masih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum, ada siswa yang acuh tak acuh dalam pelaksanaan pesta demokrasi dilingkungan sekolah, terdapat siswa yang tidak menghargai pendapat teman, yang tentunya nilai demokrasi belum terpenuhi secara efektif.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas melaksanakan penelitian dengan judul **"Peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua".**

## 1.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini yaitu: peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua ?

2. Apa saja kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua.
2. Untuk mengetahui kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua

## 1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang dijelaskan, oleh karena itu harapan dari hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Secara umum, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam menanamkan nilai demokrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa
b. Secara khusus
    1) Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memotivasi para guru untuk menerapkan nilai demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
    2) Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam berperan untuk menanamkan nilai

demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMP Negeri 4 Tuhemberua.

3) Bagi Siswa, dapat memberikan pemahaman bahwasanya dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adanya dampak dalam penanaman nilai demokrasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.